

BPBD KOTA BEKASI



2026

RENCANA KERJA (RENJA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Rencana kerja ini disusun **berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029**, sehingga seluruh program dan kegiatan BPBD selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, khususnya dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan bencana di wilayah kita.

Penyusunan Rencana Kerja BPBD Kota Bekasi merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, khususnya dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan bencana di wilayah Kota Bekasi. Rencana kerja ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional maupun daerah, sehingga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana. Penyusunan rencana kerja ini disesuaikan dengan rencana kerja yang ada di setiap seksi yaitu sekretariat, pencegahan dan kesiapsiagaan, darurat logistik maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mendukung kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi khususnya di Tahun 2026.

Semoga rencana kerja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan daerah yang tangguh menghadapi bencana, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Bekasi,

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BEKASI,

IMAN SETIA GUNAWAN ST.,MT

Pembina / IV.a

NIP. 19761014 200604 1 011

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN.....

1.1 LATAR BELAKANG.....

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANA RENJA TAHUN 2023.....

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD.....

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD..

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
.....

1.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD.....

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan bagian dari siklus perencanaan Pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini memiliki peran strategis sebagai penjabaran lebih operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD serta menjadi masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan BPBD selaras dengan visi Pembangunan daerah, prioritas nasional, serta agenda Penanggulangan Bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko, peningkatan kapasitas, dan perlindungan masyarakat Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, pertumbuhan infrastruktur pesat, serta kompleksitas permasalahan lingkungan memiliki potensi resiko bencana non alam seperti kegagalan teknologi dan penyakit menular.

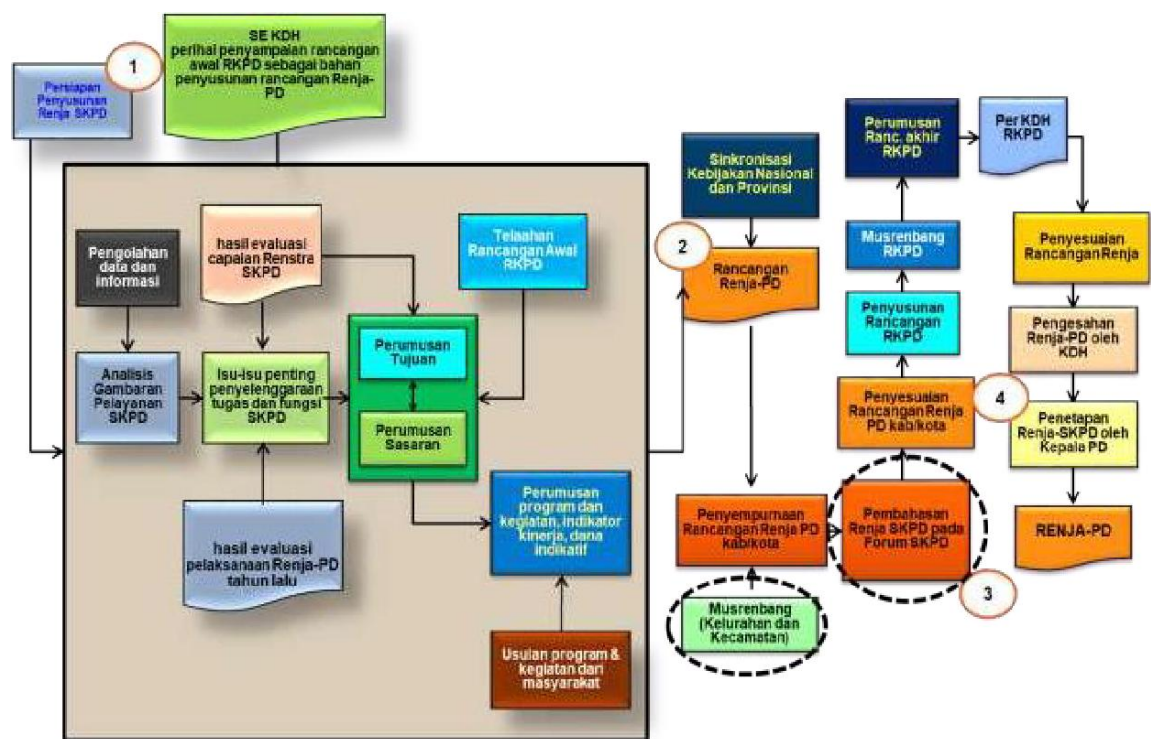
Dalam Konteks tersebut, keberadaan dokumen Rancangan Renja menjadi penting untuk menyediakan arah kebijakan tahunan BPBD, menjadi pedoman awal perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2027, mengintegrasikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan menjadi dasar pembahasan dalam forum perangkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renja ini juga memperhatikan hasil Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 22 Juni 2025, serta menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/878/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 13 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Rancangan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2026 menyepakati 2 Program, 9 Kegiatan, 22 Sub Kegiatan dan Rp. 12.832.756.360 Pagu Indikatif.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1

Keterkaitan Tahapan penyusunan Renja dengan RKPD



Bedasarkan gambar diatas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan melalui Renja hingga Penetapan Renja SKPD oleh Kepala Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 No.36);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Perwal Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan awal dalam perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan bencana, sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Kerja Final.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah :

2. Menjabarkan arah kebijakan dan strategi BPBD dalam rencana tahunan;
3. Menyusun daftar program dan kegiatan prioritas sesuai dengan isu strategis dan kebutuhan penanggulangan bencana;
4. Menjadi dasar penganggaran kegiatan BPBD dalam APBD tahun 2026;
5. Menyediakan pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penanggulangan bencana;
6. Menjamin konsistensi dan keterpaduan antara Rencana Kerja (RENJA) BPBD dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih tinggi.

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program kegiatan dan sub.kegiatan. berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program kegiatan dan sub.kegiatan yang tercapai atau tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi target yang di tetapkan;
2. Implikasi terhadap target capaian program renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor -faktor penyebab tercapaianya atau tidak tercapaian target kinerja program kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2026 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA BEKASI

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, BPBD pada tahun 2026 melaksanakan 2 program yaitu :

1. Program Penanggulangan Bencana dengan 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 5.163.687.360
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan 6 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 7.669.069.000

Hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Kota Bekasi

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	32,78	32,78	100%	39,24%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	63,21	63,21	100%	0%	100%
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat	112 Orang	112 Orang	100%	100%	100%	1000 Orang	1000 Orang	100%

			Tinggalnya								
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0%	100%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	63,21	63,21	100%	41,67%	100%
3	Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	120 Orang	132 Orang	132 Orang	100%			
			Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten atau Kota yang mengikuti Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						4 Kawasan	4 Kawasan	100%
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	168 Laporan	168 Laporan	69,64	12 Laporan	6,00%	100%
5	Gladi Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	650 Orang	650 Orang	0	0	0	0	0	0
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC Penanggulangan Bencana Yang Dilatih Dasar Manajemen Bencana (DMB)	70 Orang	70 Orang	120 Orang	120 Orang	20,00	3 Orang	0	100%
7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga	80 Orang	0	0	0	600 Keluarga	600 Keluarga	100%
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0

		Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi								
9	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	0	0	0
10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	19,92	100%	40.80%	100%
11	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	121 Orang	121 Orang	133 Orang	133 Orang	39,85	145 Orang	4.00%	100%
12	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	250 Orang	262 Orang	262 Orang	0	274 Orang	216%	100%
13	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	0
14	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas Kabupaten/Kota yang tertangani	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	0
15	Penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	0	36 Unit	36 Unit	0	0	0	0
16	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	0	0	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	0

17	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0	0	0
18	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%			
19	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	4 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	0	0	0
20	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pndukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0	0	0
21	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0	0	0
22	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	0	0	0	0	0	25 Orang	0	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	90,85	90,85	100%	98.96%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	1.00%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	6 Laporan	0	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	550.00%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436 Orang/Bulan	424 Orang/Bulan	405 Orang/Bulan	405 Orang/Bulan	96,05	1596 Orang/Bulan	1596 Orang/Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan		100,00	6 Laporan	0	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen yang tersedia	100%	100%	100%	100%	91,33	100%	36.67%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30 Paket	30 Paket	96,67	3 Paket	1.00%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	60,00	1 Paket	0	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	144 Dokumen	144 Dokumen	100%	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	7 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	100%	12 Laporan	6.00%	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1600 Dokumen	1600 Dokumen	1920 Dokumen	1920 Dokumen	100%	12 Dokumen	6.00%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							50.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	12 Laporan	6.00%	100%



	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6.00%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpeliharaa	100%	100%						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1.00%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	18 Unit	0	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	120 Unit	120 Unit	19,17	120 Unit	0	100%

Berdasarkan tabel rekapitulasi, dapat disimpulkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kota Bekasi Tahun 202 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, bahkan sebagian besar menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta adanya dukungan faktor internal maupun eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja BPBD.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini fokus pada aspek manajerial, administrasi, dan dukungan kelembagaan. Hasilnya antara lain:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berhasil mencapai target dengan tersedianya dokumen sesuai ketentuan.
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja terlaksana sesuai target (19 laporan terselesaikan).
- Administrasi keuangan menunjukkan konsistensi dengan realisasi laporan bulanan, triwulanan, semesteran, hingga tahunan yang lengkap 100%.
- Administrasi kepegawaian terlaksana dengan baik melalui penyediaan pakaian dinas, monitoring kinerja, hingga pelatihan dan bimbingan teknis pegawai.
- Dukungan sarana prasarana perkantoran seperti logistik, barang cetakan, bahan bacaan, kunjungan tamu, dan pemeliharaan aset terlaksana sesuai target, dengan tingkat capaian rata-rata 100%.
- Pemeliharaan barang milik daerah, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas serta kendaraan operasional.

3. Program Penanggulangan Bencana

Program ini merupakan inti dari tugas BPBD, dengan hasil sebagai berikut:

- Pelayanan informasi rawan bencana dan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) berhasil diselesaikan sesuai target dengan tersedianya dokumen resmi.
- Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) menjangkau sasaran warga termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ditingkatkan melalui Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- Layanan darurat bencana berhasil dilaksanakan melalui pencarian dan evakuasi korban, distribusi logistik, dan respon cepat terhadap status darurat.
- Penataan sistem dasar penanggulangan bencana berjalan baik melalui pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.

4. Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian maksimal tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- Dukungan regulasi dan kebijakan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendanai kegiatan prioritas.
- Kapasitas aparatur BPBD yang semakin meningkat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lapangan.
- Koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga mitra yang semakin baik, termasuk dukungan TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan kegiatan simulasi yang memperkuat ketangguhan komunitas.
- Pemanfaatan teknologi informasi (Pusdalops) yang semakin optimal dalam menyajikan data dan informasi kebencanaan.

4. Pelajaran Penting

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2024 menjadi modal penting dalam penyusunan Rancangan Renja 2026. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memperluas cakupan kegiatan berbasis masyarakat agar semakin merata di seluruh wilayah rawan bencana di Kota Bekasi.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA BEKASI

Evaluasi kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun perencanaan program/kegiatan periode selanjutnya. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci di tujukan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Proyeksi / Perkiraan Capaian Kinerja Tahun		Catatan Analistik
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Resiko Bencana	100%	%	122	108	103	98	122	108	103	98	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD		IKU	75,80	75,80	75,80	75,80	60,10	60,10	100,00%	100,00	
3	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
4	Prosentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
5	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	99,46	100.92%	100.00%	100.00%	
6	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	97,45	100%	100.00%	100.00%	
7	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	100%	100.00%	100.00%	
8	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	



NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Proyeksi / Perkiraan Capaian Kinerja Tahun		Catatan Analistik
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
9	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
10	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
11	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	

ISU

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Tabel Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Interval nilai evaluasi kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2024. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen (%)	100	99,46	99,46%	100	100	100%
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen (%)	100	97,45	97,45%	100	100	100%
3	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Persen (%)	100	100	100%	100	100	100%

Pada tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama dengan indikator “Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana” realisasi sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%.

Hasil ini didapatkan berdasarkan pelaksanaan Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD Kota Bekasi Sub-Urusan Kebencanaan pada Tahun 2024.

Kegiatan tersebut juga ditunjang oleh pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan baik di lapangan maupun di Kantor BPBD Kota Bekasi dan pemberian informasi melalui sosial

media yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi pada tahun 2024. Tidak hanya itu, hasil ini didasarkan oleh proses pelaksanaan, tahapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebencanaan BPBD Kota Bekasi pada Tahun 2024.

a. Indeks Risiko Bencana

Dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, urusan Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan dalam Upaya Pengurangan resiko bencana merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi pengurangan resiko bencana menjadi semakin kuat karena perubahan paradigma penanggulangan bencana dari paradigma kedaruratan bencana menjadi paradigma pengurangan resiko bencana.

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melaksanakan Evaluasi dan Pemantuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota se-indonesia dengan melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang menjadi acuan untuk berbagai Kementrian / Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2024, tidak kurang dari 400 Kabupaten dan Kota telah menyampaikan hasil penilaian IKD kepada BNPB, meningkat dari tahun 2023, dan Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memperhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota. Selanjutnya, buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini juga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana mengamanatkan Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan dan Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya oleh karena itu, perlu diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Perbandingan capaian nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat lihat pada tabel di bawah ini :

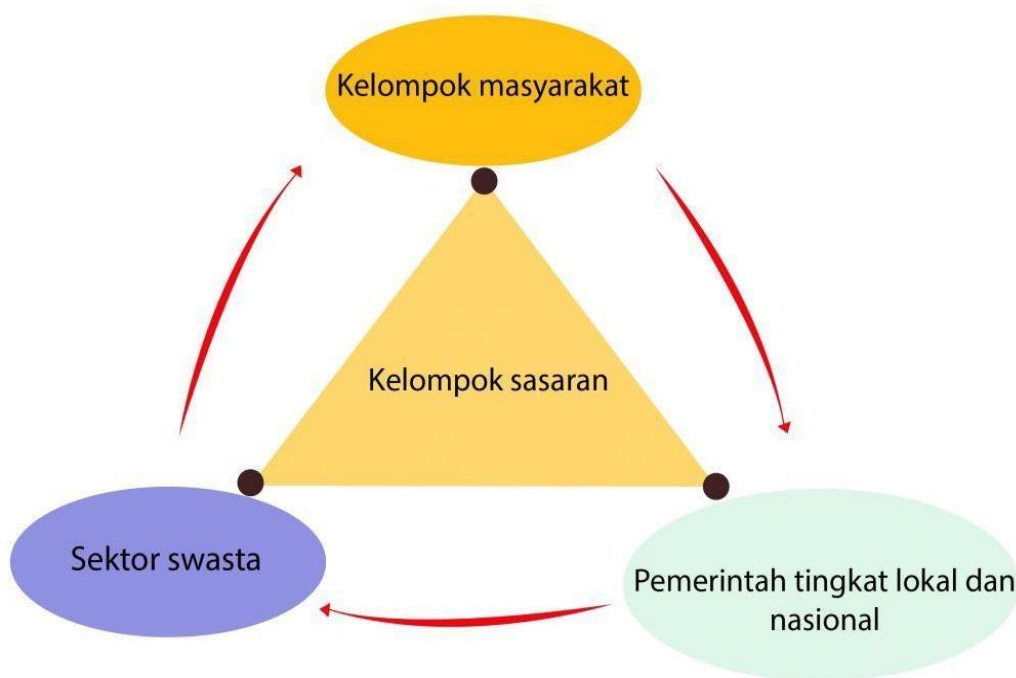
**Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 dan
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai AKIP	75,80	60,06	66,23	75,80	60,10	79,23

Berdasarkan Tabel diatas untuk indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD, capaian tahun 2024 yaitu sebesar 60,10 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 60,06. Dan Berdasarkan evaluasi atas SAKIP BPBD oleh Inspektorat Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 60,10 (Kategori B).

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana bagi warga/masyarakat kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi membuat kelompok sasaran untuk efisien dan efektif dalam penanggulangan bencana di kota Bekasi diantaranya sebagai berikut :

Gambar 2.1



1. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran ini adalah kelompok yang menjadi pendukung dalam bersinergi dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok sasaran yang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi laksanakan dalam program kegiatan dan Sub.Kegiatan serta untuk mendukung capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan Pelayanan terhadap Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menetapkan Kelompok Sasaran yang diantaranya sebagai berikut :

- Warga / masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada kawasan rawan bencana
- Warga / masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Warga / masyarakat dan aparatur yang mengikuti pelatihan serta sosialisasai yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
- Warga / masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Warga / masyarakat yang menjadi korban bencana di kawasan rawan bencana

Selain kelompok sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang dimana SPM ini menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan Oleh Kabupaten / Kota dan masyarakat berhak memperoleh layanan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SPM diterapkan dan di tetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:

- a. bersifat mutlak; dan
- b. mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar serta penerima pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
I	PROVINSI	ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	
II	KABUPATEN / KOTA		
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2.	pelayanan informasi rawan bencana		Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berP. otensi teRp. apar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota.
3.	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana

4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana
----	--	--	---

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bekasi apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan BPBD telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Isu strategis yang didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang memadai sebagai solusi dari setiap permasalahan yang ada. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Meningkatnya kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta terlaksananya program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan dan perlu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator nasional penanggulangan bencana berperan dalam melakukan verifikasi, validasi, serta konsolidasi data dari seluruh daerah, termasuk Kota Bekasi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan basis data nasional kebencanaan yang komprehensif, yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, penetapan status keadaan darurat, serta perencanaan dukungan anggaran dan bantuan logistik. Dalam pelaksanaannya, penyediaan dan pertukaran data teknis kebencanaan memerlukan standar yang seragam, baik dalam format pelaporan, penggunaan sistem informasi geografis (GIS), maupun dalam penentuan indikator dampak dan kerugian. Standarisasi tersebut penting untuk menghindari duplikasi, perbedaan angka, serta keterlambatan informasi yang dapat mempengaruhi respons penanganan bencana. BPBD Kota Bekasi berperan sebagai perangkat daerah yang mendukung penyusunan IRBI melalui penyediaan dan pemutakhiran data kebencanaan daerah. Dalam konteks ini, BNPB berperan sebagai penyusun standar, sistem nasional, dan integrator data, sedangkan BPBD berperan sebagai penghimpun, pengelola, dan penyedia data teknis kebencanaan daerah.

Dalam penyusunan **Kajian Risiko Bencana (KRB)**, koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga merupakan tahapan yang sangat krusial. KRB membutuhkan pendekatan multi-sektoral karena data teknis yang dibutuhkan tersebar di berbagai instansi.

Berikut adalah panduan menyusun jadwal, pembagian peran, serta tahapan koordinasi dengan perangkat daerah dan BNPB:

1. Identifikasi Instansi & Kebutuhan Data Teknis

Berikut adalah matriks kebutuhan data teknis:

Instansi / Perangkat Daerah	Data Teknis yang Dibutuhkan
Bappeda	RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), data kependudukan makro, RPJMD.
Dinas PU / PR	Data infrastruktur, jaringan jalan, drainase, peta rawan longsor/banjir teknis, tata guna lahan riil.
Dinas Sosial	Data kelompok rentan (lansia, difabel, balita), sebaran kemiskinan, logistik kebencanaan.
Dinas Kesehatan	Kapasitas fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas), data epidemiologi pasca-bencana.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Data daya dukung & daya tampung lingkungan, peta tutupan lahan.
Disdukcapil	Data demografi mikro (by name, by address / per kecamatan & desa).
BMKG / PVMBG (Instansi Vertikal)	Data klimatologi (curah hujan), aktivitas seismik, sejarah gempa/tsunami, peta kawasan rawan bencana geologi.
BNPB (Pusat)	Pedoman metodologi KRB, asistensi teknis, integrasi sistem InaRISK, dan validasi dokumen akhir.

2. Timeline & Tahapan Jadwal Koordinasi (Metode 4 Tahap)

Proses koordinasi ini idealnya berjalan paralel dengan penyusunan dokumen KRB selama 3 hingga 4 bulan.

Tahap I: Persiapan & Kick-Off Meeting (Minggu 1 - 2)

- Agenda: Penyelarasan pemahaman regulasi KRB (merujuk pada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 atau aturan terbaru), pembentukan Tim Penyusun (FGD I), dan pembagian kuisioner/form kebutuhan data.
- Pihak Terlibat: Sekda, BPBD, Bappeda, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan perwakilan ke deputian sistem dan strategi BNPB (via daring/luring).
- Output: SK Tim Penyusun dan kesepakatan format data (spasial/GIS dan tabular).

Tahap II: Pengumpulan & Sinkronisasi Data Teknis (Minggu 3 - 6)

- Agenda: One-on-one meeting atau asistensi meja-ke-meja (desk coordination) dengan OPD teknis untuk mengumpulkan data mentah, melakukan pembersihan data (data cleaning), dan menyatukan format koordinat peta (GIS).
- Pihak Terlibat: BPBD (Pokja Data) dan perwakilan teknis masing-masing OPD (operator GIS/Analisis Data).
- Output: Database spasial dan tabular yang siap diolah untuk analisis bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity).

Tahap III: Analisis & Draft KRB (Minggu 7 - 10)

- Agenda: FGD II untuk memaparkan hasil analisis sementara (peta bahaya dan risiko sementara) kepada perangkat daerah untuk mendapatkan masukan/koreksi lokal (local wisdom & ground checking).
- Pihak Terlibat: Tim Ahli/Konsultan, BPBD, OPD terkait, perwakilan masyarakat/akademisi.
- Output: Draft Dokumen KRB dan Peta Risiko Bencana skala kabupaten/kota.

Tahap IV: Konsultasi Teknis & Validasi BNPB (Minggu 11 - 14)

- Agenda: Desk asistensi dengan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB untuk memastikan metodologi yang digunakan selaras dengan standar nasional (InaRISK).
- Pihak Terlibat: BPBD (Tim Penyusun) dan Tim Validator BNPB Pusat.
- Output: Berita Acara Validasi/Rekomendasi dari BNPB.

Tahap V: Finalisasi & Legalisasi (Minggu 15 - 16)

- Agenda: Penyusunan dokumen final berdasarkan masukan BNPB dan proses legalisasi dokumen KRB melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- Pihak Terlibat: BPBD, Bagian Hukum Setda, Kepala Daerah.
- Output: Dokumen KRB yang legal dan siap diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RTRW.
-

3. Tips Strategis agar Koordinasi Berjalan Lancar

- Gunakan Surat Edaran Sekda: Dibandingkan surat undangan biasa dari BPBD, surat permintaan data yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Kepala BPBD Ex-Officio akan jauh lebih efektif menekan ego sektoral perangkat daerah.
- Sepakati Format Data Sejak Awal: Pastikan meminta data spasial dalam format .shp (Shapefile) dengan sistem proyeksi yang seragam (misal: WGS 84 / UTM Grid sesuai zona wilayah Anda) untuk menghindari hambatan saat overlay peta.
- Konsultasikan ke BNPB Sejak Dini: Jangan menunggu dokumen selesai 100% baru berkonsultasi ke BNPB. Lakukan asistensi berkala ke BNPB (khususnya saat peta bahaya/hazard selesai dibuat) agar jika ada koreksi metodologi, tim tidak perlu mengulang pekerjaan dari nol.

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan langkah strategis untuk menggeser paradigma penanggulangan bencana dari yang dulunya bersifat responsif (saat terjadi bencana) menjadi preventif (pencegahan dan mitigasi) berbasis masyarakat.

FPRB berfungsi sebagai wadah bertemunya unsur Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media) di tingkat lokal guna memperkuat kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana.

Berikut adalah langkah sistematis, struktur organisasi, dan program kerja untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan FPRB:

1. Tahapan Pembentukan FPRB Berbasis Masyarakat

Untuk memastikan forum ini aktif dan bukan sekadar formalitas di atas kertas, proses pembentukannya harus melibatkan masyarakat sejak awal:

Tahap I: Sosialisasi dan Penyadaran (Inisiasi)

Kegiatan: Pertemuan awal di tingkat desa/kelurahan/kecamatan untuk memetakan tokoh masyarakat potensial (Ketua RT/RW, tokoh agama, penggerak PKK, karang taruna).

Fokus: Mengedukasi masyarakat mengenai kerentanan wilayah mereka (bisa memanfaatkan data peta bahaya dari dokumen KRB yang telah disusun) dan pentingnya memiliki wadah koordinasi mandiri.

Tahap II: Rembuk Warga & Pemilihan Pengurus

Kegiatan: Pelaksanaan musyawarah warga untuk merumuskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sederhana serta memilih jajaran pengurus forum secara demokratis.

Prinsip: Pastikan kepengurusan bersifat inklusif dengan melibatkan keterwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas.

Tahap III: Legalisasi dan Pengukuhan

Kegiatan: Penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa, Lurah, atau Camat (tergantung tingkat pembentukan) serta pengukuhan resmi yang disaksikan oleh BPBD Kabupaten/Kota.

Fungsi: Legalitas ini penting agar FPRB memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengakses pendanaan (misal: Dana Desa) atau menjalin kemitraan dengan pihak swasta (CSR).

2. Struktur Organisasi FPRB Tingkat Lokal

Struktur FPRB didesain ramping namun fungsional, dengan pembagian divisi yang berfokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan:

Divisi Edukasi: Bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan warga (sosialisasi, simulasi di sekolah/posyandu).

Divisi Mitigasi: Berfokus pada aksi nyata pengurangan risiko fisik dan lingkungan (penanaman pohon, kerja bakti saluran air, pemeliharaan jalur evakuasi).

Divisi Kesiapsiagaan: Mengelola sistem peringatan dini berbasis komunitas (misal: kentongan, pemeliharaan sirine) dan menyusun rencana kontingensi keluarga.

3. Program Kerja Strategis Meningkatkan Partisipasi Warga

Agar partisipasi masyarakat terus hidup, FPRB harus menggerakkan program-program yang bersifat partisipatif dan berdampak langsung:

A. Pemetaan Risiko Secara Partisipatif (Community-Based Risk Mapping)

FPRB mengajak warga turun langsung ke lapangan untuk menandai area rawan di lingkungan mereka (misal: jembatan rapuh, tebing rawan longsor, rumah warga rentan). Data ini kemudian dituangkan dalam Peta Risiko Sederhana yang dipajang di balai desa/pos ronda agar semua warga sadar.

B. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)

FPRB menjadi motor penggerak transformasi wilayahnya menjadi Desa Tangguh Bencana. Warga dilatih untuk membuat perencanaan evakuasi mandiri, sehingga ketika bencana terjadi, mereka tidak lagi menunggu instruksi dari pusat, melainkan sudah tahu harus menyelamatkan diri ke mana.

C. Simulasi Evakuasi Berkala (Rutin)

Masyarakat akan cepat lupa jika hanya diberi teori. FPRB bertugas menyelenggarakan simulasi bencana (misal: gempa bumi atau banjir) secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun, bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB).

D. Integrasi Mitigasi ke Tradisi Lokal (Local Wisdom)

Meningkatkan partisipasi akan lebih mudah jika dikaitkan dengan budaya setempat. Contohnya: menghidupkan kembali budaya gotong royong membersihkan sungai menjelang musim hujan atau menjaga hutan adat untuk mencegah longsor.

Kunci keberlanjutan FPRB terletak pada komunikasi dua arah. BPBD bertindak sebagai pembina teknis yang memberikan pelatihan (*capacity building*), sedangkan FPRB bergerak sebagai eksekutor di garis depan yang paling memahami kondisi lapangan dan karakteristik masyarakatnya sendiri.

Sinkronisasi data teknis kebencanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Satu data kebencanaan (*single source of truth*)
2. Berjenjang dan berlapis (kelurahan → kecamatan → kota → nasional)
3. Koordinatif dan fungsional, bukan struktural
4. Berbasis kewenangan sektoral OPD

BPBD berfungsi sebagai simpul utama (*clearing house*) data kebencanaan daerah dengan tugas:

1. Menghimpun data teknis dari perangkat daerah sesuai bidangnya
2. Melakukan validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data
3. Menyajikan data dalam format yang sesuai standar nasional BNPB
4. Menyampaikan data ke sistem nasional BNPB secara berkala maupun insidental

Data tersebut meliputi kejadian bencana, potensi ancaman, kerentanan penduduk, kapasitas daerah, serta informasi infrastruktur dan lingkungan yang berkaitan dengan risiko bencana. Data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bekasi menjadi bagian penting dalam proses analisis BNPB untuk menentukan tingkat risiko bencana di wilayah Kota Bekasi. Hasil IRBI yang ditetapkan oleh BNPB dimanfaatkan oleh BPBD Kota Bekasi sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta rencana kontinjensi, khususnya terhadap ancaman banjir yang menjadi risiko dominan di Kota Bekasi. Selain itu, IRBI juga digunakan sebagai acuan dalam penentuan prioritas program mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, serta pengusulan dukungan anggaran dan bantuan sarana prasarana kebencanaan dari pemerintah pusat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menyusun jadwal koordinasi dan sinkronisasi dengan Lembaga/perangkat daerah terkait dalam aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan validasi data kebencanaan lintas forum kebencanaan, integrasi data dalam satu sistem informasi kebencanaan, mendukung dalam

penyusunan perencanaan, mitigasi, dan respon cepat terhadap bencana. Pembentukan dan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana di Kota Bekasi. Melalui FPRB, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah Kota Bekasi menetapkan kebijakan resmi pembentukan FPRB, BPBD Kota Bekasi berperan sebagai fasilitator dan pembina FPRB, alokasi anggaran mitigasi berbasis komunitas diperkuat dan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi FPRB dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di wilayah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, BPBD tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan wadah kolaborasi multipihak yang beranggotakan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya pengurangan risiko bencana. FPRB dibentuk sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.

Hubungan antara BPBD Kota Bekasi dan FPRB bersifat kemitraan dan koordinatif. BPBD Kota Bekasi berperan sebagai pembina, fasilitator, serta koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana, sedangkan FPRB berperan sebagai mitra partisipatif yang membantu pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat. Melalui FPRB, BPBD dapat menjangkau komunitas dan kelompok masyarakat secara lebih luas dalam kegiatan sosialisasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan relawan, serta pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana. Selain itu, FPRB juga berperan memberikan masukan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada BPBD Kota Bekasi dalam penyusunan kebijakan dan program penanggulangan bencana, termasuk dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan rencana kontinjensi. Kolaborasi tersebut mendukung penerapan prinsip pentahelix dalam penanggulangan bencana, yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Berikut ini Laporan Kegiatan FPRB Kota Bekasi selama tahun 2023 sampai dengan 2025 :

Laporan Kegiatan FPRB Kota Bekasi selama tahun 2023 sampai dengan 2025

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGA L	CATATAN	FOTO
1	Pembentukan FPRB Kota Bekasi	13 September 2023	Awal Pembentukan FPRB Kota Bekasi dihadiri : 1. Alm. Agus Wildan S. (Ketua FGI) 2. Akhirul Soleh (FGI) 3. Henry Nurdiansyah "Valent" (FGI) 4. Karsono (BPBD) 5. Alm. Anton Agusta (Mentor kebencanaan) 6. Abdul Haris (Baznas, Balon FPRB Kota Bekasi)	

2	Rakor #1 FPRB Kota Bekasi	14 November 2023	Rakor Persiapan Pelantika FPRB Kota Bekasi	
3	Giat Pelantikan FPRB Kota Bekasi	21 November 2023	Pelantikan FPRB Kota Bekasi di Pemkot Bekasi	
4	Giat K3 Bersama Kodim Bekasi	Desember 2023	Giat K3 dan Kebersihan bersama Kodim Kota Bekasi	
5	Rakor #2 FPRB Kota Bekasi	20 January 2024	Notulen : 1. Permohonan Sekretariat FPRB Kota Bekasi 2. Membuat strategi Komunukasi dan kordinasi kebencanaan kepada Rescue dan pihak lain atau teman2 terkait. 3. FPRB Kordinasi untuk ikut menjaga di posko bencana Bersama BPBD. 4. FPRB ikut serta Pemetaan daerah yang terkena Bencana. 5. Menentukan Team Satgas FPRB Kota Bekasi 6. Pembahasan Persiapan Peningkatan Kapasitas Relawan FPRB Kota Bekasi	
6	RAKERNAS FPRB Kota Bekasi	2 February 2024	RAKERNAS Perdana FPRB Kota Bekasi di RUPINGKAL. Pelantikan Team Satgas FPRB Kota Bekasi	
7	Giat Peningkatan Kapasitas Relawan terhadap Bencana #1	14-15 Juni 2024	Pelatihan Anggota Team Satgas FPRB Kota Bekasi dalam peningkatan kapasitas relawan terhadap Bencana	
8	Rakor #3 FPRB Kota Bekasi	27 February 2025	Notulen : 1. Pembahasan rencana pembentukan Forum PRB tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2. Membuat Plan Edukasi & Mitigasi ke Sekolah- sekolah dan instansi Kota Bekasi	
9	Audiens FPRB Kota Bekasi bersama Walikota Bekasi	22 May 2025	Audiens Permohonan Dana Hibah APBD dan Kantor Sekretariat FPRB Kota Bekasi	
10	Giat Peningkatan Kapasitas Relawan terhadap Bencana #2	8-9 Agustus 2025	Peningkatan Kapasitas Relawan & Manfaat ZIS untuk relawan kebencanaan Kota Bekasi	
11	Giat POS Gab bencana Kebakaran Bintara	16 Agustus 2025	FPRB Kota Bekasi bergabung dengan posko siaga korban bencana kebakaran di Bintara Bekasi Barat	

Dalam proses perencanaan BPBD Kota Bekasi menemukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD, yaitu antara lain :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia di BPBD yang ideal baik secara kuantitas sebagaimana hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maupun dari segi kualitas yang masih menunjukkan kesenjangan kapasitas dan kompetensi perencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD; dan
2. Beban kerja BPBD yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peran BPBD selain melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Bekasi

sesuai dengan visi dan misi kepala daerah juga melaksanakan penyelarasan perencanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sekaligus memberikan supervisi dalam hal perencanaan pembangunan dalam urusan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, proses perencanaan merupakan tahapan penting untuk memastikan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi–rekonstruksi berjalan efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya BPBD Kota Bekasi masih menghadapi beberapa kelemahan internal serta ancaman eksternal yang mempengaruhi optimalisasi perencanaan.

Kelemahan	Ancaman
Beberapa kelemahan internal dalam proses perencanaan antara lain: Keterbatasan data kebencanaan yang terintegrasi Data kejadian bencana masih tersebar pada beberapa instansi terkait sehingga pemutakhiran data belum sepenuhnya real time dan belum seluruhnya terintegrasi dalam satu sistem informasi kebencanaan daerah. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perencana kebencanaan Jumlah dan kompetensi aparatur yang memiliki keahlian teknis kebencanaan, kajian risiko, serta perencanaan kontinjensi masih terbatas, sehingga penyusunan dokumen perencanaan belum optimal. Keterbatasan anggaran mitigasi Alokasi anggaran masih lebih banyak terserap pada kegiatan tanggap darurat dibandingkan kegiatan mitigasi dan pencegahan, sehingga program	Beberapa ancaman eksternal yang mempengaruhi proses perencanaan, antara lain: Tingginya potensi dan frekuensi bencana banjir Kota Bekasi dilalui aliran Sungai Bekasi dan daerah aliran sungai dari wilayah hulu (Kabupaten Bogor), sehingga bencana banjir tidak hanya dipengaruhi faktor lokal tetapi juga kondisi wilayah hulu yang berada di luar kewenangan pemerintah kota. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem Intensitas curah hujan yang semakin tidak menentu meningkatkan potensi banjir, genangan, dan angin kencang yang sulit diprediksi dalam perencanaan tahunan.

pengurangan risiko bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 4. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal Penanggulangan bencana bersifat lintas sektor, namun dalam proses perencanaan masih terdapat perbedaan prioritas program antar perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pengendalian banjir, tata ruang, dan lingkungan hidup. 5. Pemanfaatan dokumen perencanaan kebencanaan belum sepenuhnya menjadi rujukan pembangunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana detail tata ruang.	3. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi Perkembangan kawasan permukiman yang pesat meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama di wilayah bantaran sungai dan daerah dataran rendah. 4. Alih fungsi lahan dan keterbatasan ruang terbuka hijau Berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan perkotaan meningkatkan risiko genangan dan banjir. 5. Ketergantungan pada koordinasi lintas wilayah Penanganan banjir sangat bergantung pada pengelolaan wilayah hulu dan kebijakan pemerintah daerah lain maupun pemerintah pusat, sehingga faktor eksternal tersebut menjadi tantangan dalam penyusunan rencana yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh BPBD Kota Bekasi.
---	---

Namun demikian, BPBD memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal yang meliputi:

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. BPBD Kota Bekasi secara legalitas sudah terbentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D) 2. Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Bekasi dari APBD; 3. Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD; 4. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD; 5. Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik beRp. ola dana hibah 6. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait; 7. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional	1. Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi masih belum memadai; 2. Belum terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 3. Proporsi pegawai/SDM sangat minum dan masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas; 4. Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Bekasi sebagai media peringatan dini dan pencegahan; 5. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan; 6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam; 7. Minimnya sarana dan prasara/ peralatan logistik BPBD Kota Bekasi ; 8. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana

Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penangan Pengusi Pada Keadaan Darurat Bencana 8. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 9. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	dengan pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
--	---

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan oleh BPBD adalah menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergi bersama perangkat daerah dan kabupaten/kota melalui forum diskusi untuk menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Selain itu, perlu penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung perumusan perencanaan pembangunan. Peningkatan kinerja pelayanan BPBD dan indikator kinerja BPBD perlu dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time* (SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait perencanaan pembangunan di Kota Bekasi, dan sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya). Data-data yang akurat dan akuntabel pada bidang penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. BPBD Kota Bekasi dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bekasi berkewajiban meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan Penanggulangan Bencana terhadap rencana pembangunan juga dapat menyelaraskan rencana pembangunan provinsi, nasional, kab/kota dan wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing Seksi dengan Perencanaan di BPBD Kota Bekasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN DENGAN RANCANGAN RKPD KOTA BEKASI TAHUN 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu menbandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program/kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan RKPD atau belum, dengan



demikian usulan dapat di review kembali pada tahap Rancangan RKPD.

Hasil review Rancangan RKPD Tahun 2026 BPBD, untuk seluruh program kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan RKPD tahun 2026 sudah sesuai dengan kebutuhan BPBD untuk Tahun Anggaran 2026 sebagaimana di sajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintah Kabupaten/Kota						Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Program Penanggulangan Bencana	IKP.1	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kota Bekasi	100%	6.288.311.743		Program Penanggulangan Bencana	IKP.1	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kota Bekasi	100%	6.288.311.743	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bekasi	100%	149.200.000		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bekasi	100%	149.200.000	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Bekasi	1000 Orang	149.200.000	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		1000 Orang	149.200.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kota Bekasi	100%	4.622.279.922		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kota Bekasi	100%	4.622.279.922	
2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Bekasi	1000 Keluarga	354.123.000	2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Bekasi	1000 Keluarga	354.123.000	

3	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Bekasi	1 Dokumen	227.928.000	3	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Bekasi	1 Dokumen	227.928.000	
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Bekasi	12 laporan	3.632.148.922	4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Bekasi	12 laporan	3.632.148.922	
5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Bekasi	1 Dokumen	83.160.000	5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Bekasi	1 Dokumen	83.160.000	
6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Bekasi	5 Kawasan	324.920.000	6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Bekasi	5 Kawasan	324.920.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Bekasi	100%	392.207.438		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Bekasi	100%	392.207.438	
7	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Bekasi	145 Orang	74.115.000	7	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Bekasi	145 Orang	74.115.000	

8	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Bekasi	1500 Orang	318.092.438	8	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Bekasi	1500 Orang	318.092.438	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	7.271.196.949		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	7.271.196.949	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100%	5.615.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100%	5.615.000	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	3.000.000	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	3.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	2.615.000	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	2.615.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100 %	6.261.703.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100 %	6.261.703.000	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	14 Bulan	6.258.778.000	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	14 Bulan	6.258.778.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	18 Laporan	2.925.000	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	18 Laporan	2.925.000	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100%	223.250.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100%	223.250.000	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	25 Orang	223.250.000	13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	25 Orang	223.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100 %	459.501.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Bekasi	100 %	459.501.000	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	90.802.000	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	90.802.000	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	15.570.000	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	15.570.000	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	50.336.000	16	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	50.336.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	2.793.000	18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	2.793.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	78.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bekasi	100%	78.000.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	78.000.000	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	78.000.000	



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bekasi	100%	641.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	641.000.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	1 Unit	49.000.000	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	49.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	25 Unit	539.000.000	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 Unit	539.000.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	120 Unit	53.000.000	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120 Unit	53.000.000	
Total						12.832.756.360		Total						12.832.756.360

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGAM DAN KEGIATAN DI MASYARAKAT

Pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat atau Dewan terkait dengan usulan program / pokok pikiran yang dilaksanakan pada musrembang tahun 2026 baik tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan sampai tingkat kota, namun di tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak menerima usulan masyarakat atau pokok pikiran Dewan, dan berikut tabel usulan program / kegiatan dari masyarakat atau dewan pada tahun 2026:

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI MASYARAKAT ATAU DEWAN TAHUN 2026

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUMEN	CATATAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Walaupun tidak menerima usulan dari masyarakat atau pokok pikiran dari dewan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk sub.urusan bencana di Kota Bekasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BEKASI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan penanggulangan bencana nasional dengan perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selain hal tersebut sebagai penjabaran dari Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai stekholder dalam urusan Penanggulangan Bencana Harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana untuk tercapaian nya Kebijakan dan Strategis Penanggulang Bencana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana diantaranya sebagai berikut:

1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan Sinergi Antar Kementerian / Lembaga dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana;
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan, dan akuntabel;
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penangangan kedaruratan yang cepat dan handal

6. Percepat pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
7. Penguatan Data Informasi & Literasi Kebencanaan.
8. Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancam Terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Isu strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya dan anggaran, koordinasi yang lemah antarlembaga, perencanaan tata ruang yang tidak berbasis risiko, serta kebutuhan akan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan mitigasi, mulai dari pemetaan, sosialisasi, hingga tindakan nyata seperti penghijauan dan pelibatan dalam program kesiapsiagaan bencana.

Isu Strategis Utama:

1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat yang Rendah
 - o Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko bencana di wilayah mereka atau pentingnya langkah-langkah mitigasi.
 - o Keterbatasan informasi, terutama di daerah terpencil, memperburuk kurangnya kesadaran ini.
2. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran
 - o Pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini memerlukan investasi besar yang belum tentu tersedia di semua daerah.
 - o Sumber daya seperti tenaga manusia, modal, dan teknologi belum optimal dimanfaatkan untuk mitigasi.
3. Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah
 - o Upaya mitigasi melibatkan berbagai pihak (pemerintah, lembaga, masyarakat), namun koordinasi yang efektif sering menjadi masalah, menghambat penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
4. Perencanaan Tata Ruang yang Tidak Sesuai
 - o Pembangunan sering tidak mempertimbangkan potensi risiko bencana di wilayah tersebut, yang berujung pada kerugian besar saat bencana terjadi.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1. Pendidikan dan Sosialisasi Komprehensif
 - o Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, peringatan dini, dan tindakan yang harus dilakukan saat bencana.
 - o Mengembangkan program berbasis masyarakat, seperti Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.
2. Pemberdayaan dan Pelibatan Aktif
 - o Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan upaya mitigasi.
 - o Mendorong partisipasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tenaga untuk membangun infrastruktur (misalnya dinding penahan longsor), ide, hingga uang dan barang.
3. Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Berbasis Komunitas
 - o Mendorong partisipasi masyarakat dalam perawatan fasilitas dan infrastruktur kebencanaan di lingkungan mereka.
 - o Menginisiasi tindakan seperti penghijauan dan penanaman mangrove oleh masyarakat untuk mencegah bencana seperti tanah longsor dan banjir rob.
4. Penguatan Sistem Peringatan Dini
 - o Memastikan masyarakat paham status peringatan dini bencana dan tahu apa yang harus dilakukan.
 - o Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga dan memantau sistem pemantau agar selalu siap menghadapi bencana.
5. Advokasi dan Dukungan Berkelanjutan

- o Melakukan advokasi dan promosi perilaku sadar bencana untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan mitra lainnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA BEKASI

Tujuan dan Sasaran Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk :

1. Menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
2. Menjadi bahan perbandingan antaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
3. Menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mendukung tercapaainya Tujuan dan Sasaran Wali Kota Bekasi serta Indikator Kinerja Utama.
4. menjadi tolok ukur kinerja bagi BPBD Kota Bekasi dalam menilai implementasi melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dengan mengacu pada isu strategis di dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026 telah menetapkan prioritas Pembangunan Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.**

Sasaran Rancangan Kerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2026 meliputi sesuai dengan Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan, pencegahan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
2. Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Program kegiatan dan Sub.Kegiatan yang Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Strategi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2026 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

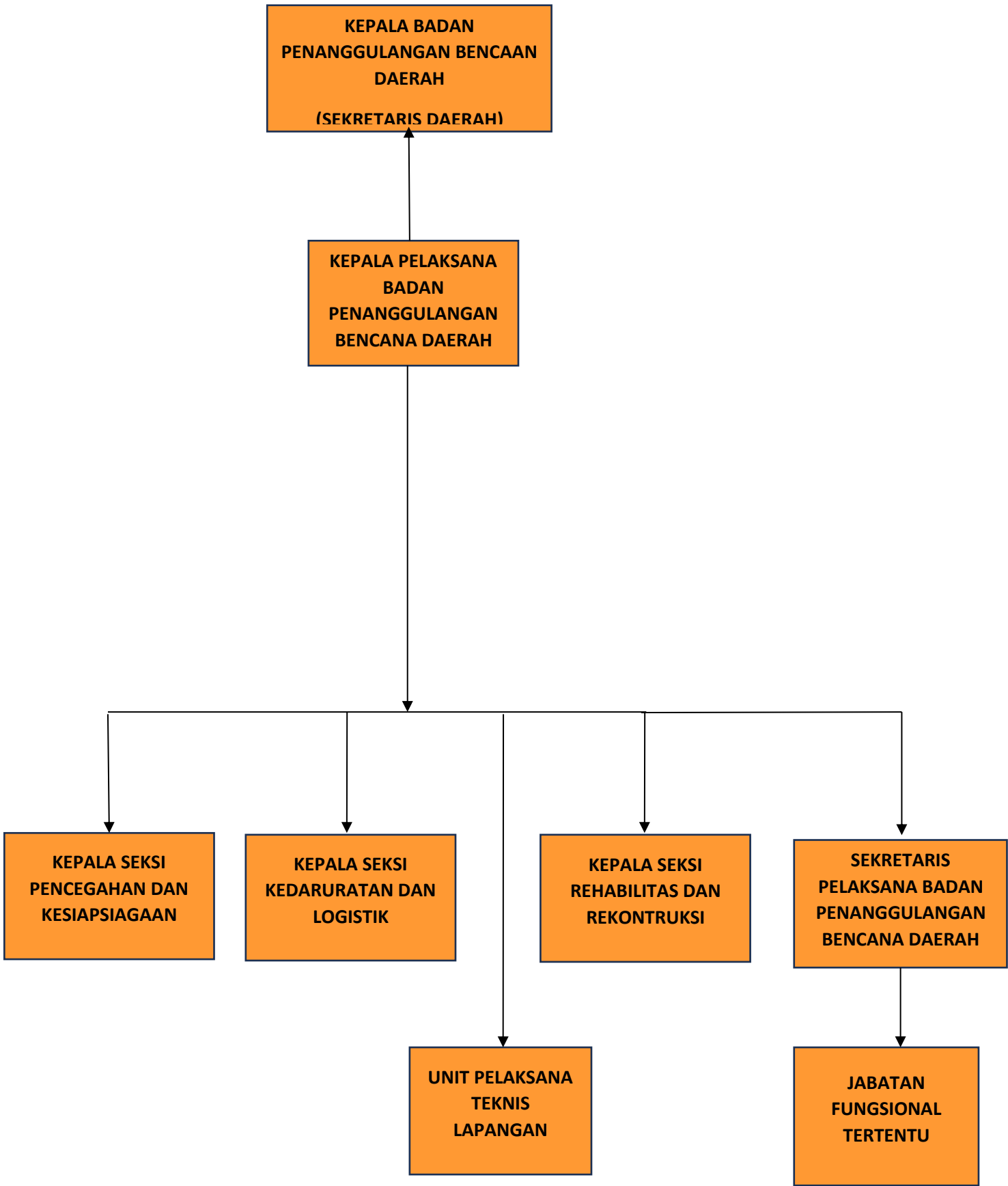
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat. 2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana. 3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur dan Relawan. 4. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai pihak ketercapaian tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran diatas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 60 Seri D).



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi



Keadaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan jumlah pada bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	ASN		
	a. Jabatan Struktural		
	- Eselon III.a	1	
	- Eselon IV.A	4	
	Jumlah a	5	5,95%
	b. Staf ASN	6	
	c. Staf CPNS	-	
	d. Jafung ASN	-	
	Jumlah a + b + c + d	6	7,14%
2	TKK	1	1,19%
3	PPPK	39	46,43%
4	PHL	33	39,29%
	Jumlah Total	84	100%

3.3 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

Dalam mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi dan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi membutuhkan program kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang penanggulangan Bencana di Kota Bekasi serta memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan bencana kepada masyarakat kota Bekasi, program kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan BPBD pada Tahun 2026, dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:



Tabel 3.3
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2026

KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		7.271.196949,00	100 %		7.271.196949,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Penganggaran	100 %		5.615.000,00	100 %		5.615.000,00	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.615.000,00	3 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.615.000,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %		6.261.703.000,00	100 %		6.261.703.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.258.778.000,00	14 bulan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.258.778.000,00	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.925.000,00	18 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.925.000,00	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Optimalisasi Disiplin Aparatur	100 %		223.250.000,00	100 %		223.250.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.250.000,00	25 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.250.000,00	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		459.501.000,00	100 %		459.501.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.802.000,00	3 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.802.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.570.000,00	1 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.570.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.336.000,00	1 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.336.000,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.793.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.793.000,00	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	100 %		78.000.000,00	100 %		78.000.000,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	12 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100 %		641.000.000,00	100 %		641.000.000,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	1 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.000.000,00	25 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.000.000,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	120 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %		6.288.311.743,00	100 %		6.288.311.743,00	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	100 %		149.200.000,00	100 %		149.200.000,00	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	Kota Bekasi, Bekasi Barat, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Rawalumbu, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Bantargebang, Semua Kel/Desa	149.200.000,00	1000 Orang	Kota Bekasi, Bekasi Barat, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Rawalumbu, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Bantargebang, Semua Kel/Desa	149.200.000,00	

KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		4.622.279.922,00	100 %		4.622.279.922,00	
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1000 orang	Kota Bekasi	-	1000 orang	Kota Bekasi	-	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1000 Keluarga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.123.000,00	1000 Keluarga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.123.000,00	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	Kota Bekasi	-	50 Orang	Kota Bekasi	-	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.928.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.928.000,00	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.632.148.922,00	12 laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.632.148.922,00	
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.160.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.160.000,00	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.920.000,00	5 Kawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.920.000,00	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 %		392.207.438,00	100 %		392.207.438,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	145 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.115.000,00	145 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.115.000,00	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.092.438,00	1500 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.092.438,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2026

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2026 untuk pendanaan Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029, pada penyusunan dokumen rancangan ini berfokus untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Wali Kota Bekasi dengan Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari dengan sasaran meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dengan terpenuhinya indikator Indeks Resiko Bencana yang rendah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sub.kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan BPBD Kota Bekasi Tahun 2026 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 2 program 11 Kegiatan dan 29 sub.kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi pada tahun 2026. Berikut rincian program kegiatan dan sub.kegiatan diantaranya sebagai berikut.



Tabel 4.1

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		7.271.196949,00	100 %		7.271.196949,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Penganggaran	100 %		5.615.000,00	100 %		5.615.000,00	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.615.000,00	3 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.615.000,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %		6.261.703.000,00	100 %		6.261.703.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.258.778.000,00	14 bulan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.258.778.000,00	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.925.000,00	18 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.925.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Optimalisasi Disiplin Aparatur	100 %		223.250.000,00	100 %		223.250.000,00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.250.000,00	25 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.250.000,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				459.501.000,00	100 %		459.501.000,00	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		90.802.000,00	3 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.802.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.570.000,00	1 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.570.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.336.000,00	1 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.336.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.793.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.793.000,00	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				78.000.000,00	100 %		78.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		78.000.000,00	12 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.000.000,00	100 %		641.000.000,00	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	100 %						
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				49.000.000,00	1 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bekasi	539.000.000,00	25 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.000.000,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100 %						
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				53.000.000,00	120 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.288.311.743,00	100 %		6.288.311.743,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.200.000,00	100 %		149.200.000,00	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.200.000,00	1000 Orang	Kota Bekasi, Bekasi Barat, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Rawalumbu, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Bantargebang, Semua Kel/Desa	149.200.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.622.279.922,00	100 %		4.622.279.922,00	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %		-	1000 orang	Kota Bekasi	-	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	100 %						
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				354.123.000,00	1000 Keluarga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.123.000,00	
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	Kota Bekasi, Bekasi Barat, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Rawalumbu, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Bantargebang, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	Kota Bekasi	-	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %						
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat	1000 orang	Kota Bekasi	227.928.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.928.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota							
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	600 Keluarga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.632.148.922,00	12 laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.632.148.922,00	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	Kota Bekasi					
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				83.160.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.160.000,00	
						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				324.920.000,00	5 Kawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.920.000,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.207.438,00	100 %		392.207.438,00	
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.115.000,00	145 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.115.000,00	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.092.438,00	1500 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.092.438,00	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 %		12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	145 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.832.756.360,00			12.832.756.360,00	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				7.271.196949,00	100 %		7.271.196949,00	
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	274 Orang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.615.000,00	100 %		5.615.000,00	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	8 Orang	Kota Bekasi	3.000.000,00	1 Dokumen	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	
	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	15 Orang	Kota Bekasi					



KODE REKENING					KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			CATATAN PENTING
							TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							

Bekasi,

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BEKASI,

Iman Setia Gunawan, S.T.,M.T

Penata Tingkat I / III b
NIP. 19761014 200604 1 011